

BAB III

ANALISIS KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL SODETAN CILIWUNG

Bab ini membahas tentang implementasi *Collaborative Governance* dalam proyek Sodedan Ciliwung yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta. Bab ini menguraikan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung, serta bagaimana efektivitasnya untuk memastikan keberhasilan proyek.

3.1 Keterlibatan Stakeholder dalam Proyek Sodedan Ciliwung

Kolaborasi antara Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah pada proyek strategis nasional, khususnya Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung, merupakan contoh penting dari penerapan prinsip tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan mengatasi masalah bersama. Kolaborasi ini menjadi penting karena proyek Sodedan Ciliwung bukan hanya sebuah upaya pengendalian banjir, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan tingkat wewenang yang berbeda.

Hal itu membuat Program Sodedan Ciliwung menjadi program narasi pemerintah pusat yang diprakarsai akibat faktor historis pengendalian banjir yang terjadi di Jakarta. Pemerintah Pusat yang diwakilkan oleh Kementrian PUPR melalui BBWS Ciliwung-Cisadane mengarahkan pembangunan ini dan menerapkan desentralisasi sehingga kewenangan proyek strategis tersebut tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat seorang, melainkan pemerintah daerah juga

sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Hal ini juga dibahas sebagaimana dokumentasi yang Peneliti dapatkan dari Bappeda mengenai “Komitmen Bersama” yang didalamnya juga ada pembahasan mengenai Sodetan Ciliwung karena termasuk dalam program jangka panjang pengendalian banjir yang sudah disetujui banyak pihak dari kementrian hingga lembaga non-kementrian dan juga pemerintah daerah pada zaman Anies Baswedan menjabat. Desentralisasi yang terjadi mengakibatkan instansi baik dari Bappeda, dinas-dinas sampai Walikota Bogor juga ikut diundang untuk pembahasan Sodetan Ciliwung ini.

Pemangku kepentingan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Program Sodetan Ciliwung terdiri dari banyak pihak yang berbeda, masing-masing dengan kepentingan dan peran yang berbeda, namun untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama yang baik. Dan tujuan utama dari keterlibatan pemangku kepentingan adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif, terutama dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan umpan balik mereka ke dalam keseluruhan kegiatan proyek. Koordinasi lintas sektoral antara institusi pemerintah, pihak swasta, dan relawan sangat penting. Sinergi antara pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi masalah banjir secara kolektif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Temuan studi Septian Herpriyono menunjukkan, untuk keberhasilan sebuah proyek, semua pemangku kepentingan harus dapat bekerja sama dengan baik. Stakeholder yang terlibat dalam proyek Sodetan Ciliwung terdiri dari berbagai pihak dengan peran antara lain:

Tabel 3.1 Peran Pemangku Kepentingan dalam Proyek Sodetan Ciliwung

Pemangku Kepentingan		Peran
Pemerintah Pusat	Kementerian PUPR	Pelaksana proyek
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mendukung dalam hal koordinasi, pembebasan lahan, dan sosialisasi ke masyarakat
	Dinas Lingkungan Hidup	Menjaga kebersihan aliran Sungai Ciliwung beserta Sodetan Ciliwung
Lembaga Swasta	Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi (JAKON)	Mengerjakan proyek Sodetan Ciliwung
Masyarakat Sipil		Sebagai pihak terdampak

Data Diolah Peneliti, 2025

Melihat data tersebut dapat dinarasikan ulang, yang dimana keterlibatan Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS), memberikan dukungan teknis dan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ferdinanto, mengutarakan bahwa peran lembaganya pada kolaborasi yang terjadi pada proyek besar dari Sodetan Ciliwung yakni:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana adanya koordinasi terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) sampai dengan pihak tingkat Kecamatan/Kelurahan.
2. Melaksanakan sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) kepada masyarakat setempat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan konstruksi. Dijelaskan juga bahwa Program Sodetan Kali Ciliwung tergolong Proyek Strategis Nasional karena sebagai salah satu upaya program Pengendalian Banjir DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁴⁵

Melihat peran di atas memang bisa terbilang urgensi yang dikejar menurut dari data BBWS Ciliwung-Cisadane adalah untuk mengurangi dampak risiko banjir yang terjadi di DKI Jakarta, yang dimana banjir sudah mengakibatkan banyak kerugian materil (berupa harta benda) maupun non materil (korban jiwa). Output yang diharapkan, adalah terbangunnya bangunan Sodetan Ciliwung dan berfungsi dengan baik sebagai salah satu prasarana pengendali banjir, sehingga dapat mereduksi genangan ataupun banjir yang terjadi di setiap bantaran Sungai Ciliwung.⁴⁶

Sejumlah institusi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ikut terlibat dalam Proyek Stratgis Nasional Sodetan Ciliwung, dan langsung berada di bawah koordinasi Bappeda, secara umum semua pihak yang terlibat mempunyai

⁴⁵ Ferdinanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, wawancara tertulis dengan Peneliti, 17 Februari 2025.

⁴⁶ Ferdinanto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, wawancara tertulis dengan Peneliti, 17 Februari 2025.

persepsi yang sama terkait urgensi Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung untuk mengatasi banjir Jakarta. Selain itu keterlibatan Pemerintah Daerah ini juga sangat penting, mengingat bahwa proyek ini berdampak langsung pada masyarakat di tingkat lokal, terutama di daerah yang berada di sekitar Sungai Ciliwung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan banjir yang salah satunya dilakukan melalui proyek Sodedan Ciliwung. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015, yang mengamanatkan berbagai langkah strategis termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian aliran sungai. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan mitigasi banjir yang selaras dengan proyek strategis nasional.⁴⁷ Bappeda disini memegang peranan dalam memastikan bahwa proyek ini selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga hasil dari proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sipil. Selain itu, Bappeda juga berperan dalam mengkoordinasikan antara berbagai instansi pemerintah daerah, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta mengawasi realisasi proyek dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat dan potensi dampak negatif yang mungkin timbul.

Hal ini selaras dengan statement dari Cipta Aditya dari Bappeda Provinsi DKI. Menurut Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, Bappeda Provinsi

⁴⁷ Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015, dapat diakses di <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/9756>

DK Jakarta, dalam Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, Bappeda bertanggung jawab untuk memastikan institusi terkait dapat menjalankan tugasnya sesuai target dan anggaran yang ada.⁴⁸ Dalam proses pengerjaan Sodetan Ciliwung, beberapa institusi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu Kementerian PUPR dalam menyiapkan lahan di lokasi rencana Sodetan Ciliwung. Oleh karena itu, Bappeda berupaya memastikan bahwa koordinasi antar institusi berjalan dengan baik agar proyek ini dapat terealisasi sesuai rencana. Dalam perspektif Bappeda, proyek Sodetan Ciliwung merupakan proyek yang sifatnya mendesak dan strategis untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Berikut ini keterangan yang disampaikan oleh Cipta Aditya:

Tujuan utama dari proyek Pembangunan Sodetan Ciliwung untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta dengan mengalihkan sebagian aliran air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Saat musim hujan, Sungai Ciliwung memiliki debit air yang tinggi, dan sodetan ini bertujuan mengalirkan sekitar 60 meter kubik per detik dari total aliran sungai tersebut untuk mengurangi potensi banjir di daerah yang terdampak. Alasan mendesaknya proyek ini karena kapasitas drainase di Jakarta saat ini terbatas. Dari kapasitas desain sebesar 2.357 meter kubik per detik, hanya sekitar 1.141 meter kubik per detik 60% yang berfungsi secara optimal. Masalah ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang meningkatkan curah hujan secara signifikan, seperti yang terlihat pada tahun 2020 (377 mm) dan 2021 (260 mm), jauh melebihi kapasitas drainase Jakarta hanya mampu menampung 100 mm curah hujan. Sodetan ini akan dibangun dengan metode pemasangan dua pipa bawah tanah yang masing-masing memiliki diameter 4,05 meter dan panjang 1,27 kilometer. Pipa ini akan mengalirkan air dari titik inlet di Jalan Sensus, Bidara Cina, menuju outlet di Cipinang Besar Selatan. Harapan utama dari proyek ini adalah memberikan manfaat jangka panjang dengan mengurangi dampak banjir di Jakarta. Hal ini dicapai melalui pengalihan sebagai debit air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur,

⁴⁸ Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, wawancara oleh Peneliti, 22 Januari 2025.

sehingga beban aliran sungai utama dapat berkurang dan risiko banjir dapat diminimalkan.⁴⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, proyek Sodedan Ciliwung adalah bagian dari strategi besar untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sistem drainase dan mengurangi tekanan air pada Sungai Ciliwung. Urgensi Proyek Sodedan Ciliwung juga dijelaskan oleh Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sendiri sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kualitas lingkungan memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengendalian banjir, tetapi juga pada pengelolaan dampak lingkungan, seperti pengelolaan sampah juga kebersihan dari DAS dan seputar proyek itu sendiri. Berdasar keterangannya, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi menjaga kebersihan aliran Sungai Ciliwung beserta Sodedan Ciliwung. Berikut ini keterangan yang disampaikan oleh Hariyanto Silalahi terkait urgensi proyek tersebut:

Proyek sodedan Ciliwung adalah proyek strategis nasional berlokasi di DKI Jakarta, sehingga Pemerintah DKI Jakarta terlibat. Proyek ini setidaknya bisa menangani atau bahkan mengurangi dampak musim hujan-banjir di Jakarta sebagai pusat ibukota. Dan berbicara output, dalam jangka pendek Proyek Sodedan Ciliwung ini diharapkan dapat mengatasi dampak banjir akibat hujan terutama bagi masyarakat sekitar bantaran kali Ciliwung.⁵⁰

⁴⁹ Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, wawancara oleh Peneliti, 22 Januari 2025.

⁵⁰ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025.

Tabel 3.2 Pihak terkait beserta tanggung jawab dalam Proyek Sodetan Ciliwung

Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BBWS Ciliwung-Cisadane)	Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi: Menyusun rencana teknis dan melaksanakan pembangunan fisik sodetan, termasuk terowongan dan infrastruktur pendukung lainnya. Pembebasan Lahan: Melakukan proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk proyek sodetan.
Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta)	Penetapan Lokasi: Menetapkan lokasi proyek sodetan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Koordinasi dan Dukungan: Memberikan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan proyek, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan penanganan dampak sosial.
Pihak Swasta (Konsorsium PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi)	Pelaksanaan Konstruksi: Sebagai kontraktor utama, konsorsium ini bertanggung jawab atas pelaksanaan konstruksi sodetan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi <i>Earth Pressure Balance Machine</i> (EPBM) dalam proses pembangunan terowongan ganda sodetan.

Data Diolah Peneliti, 2025

Pemerintah Pusat melalui BBWS Ciliwung-Cisadane dibawah Kementerian PUPR memegang peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi proyek Sodetan Ciliwung. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk proyek ini. Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemprov DKI Jakarta) berperan dalam menetapkan lokasi proyek sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memberikan dukungan serta koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan penanganan dampak sosial yang timbul akibat proyek tersebut. Dan pihak swasta dalam hal ini konsorium PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi, bertindak sebagai kontraktor utama yang berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat melaksanakan konstruksi Sodetan Ciliwung. Mereka menggunakan teknologi EPBM dalam pembangunan terowongan ganda sodetan untuk memastikan kualitas dan efisiensi proyek.

Hal ini selaras dengan dimana Proyek Sodetan Ciliwung yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Regulasi ini mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Dalam konteks proyek ini, peran pemerintah pusat lebih dominan dalam pendanaan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembebasan

lahan serta koordinasi dengan masyarakat terdampak.⁵¹ Sebagai salah satu instansi teknis di tingkat daerah, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Jakarta. Keterlibatan dinas Sumber Daya Air ini dalam proyek Sodetan Ciliwung menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi risiko banjir di Jakarta. Peran Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencakup perencanaan teknis, pengawasan implementasi proyek, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Berikut wewenang dan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta:

Tabel 3.3 Instansi Dinas Sumber Daya Air beserta kewenangan dan tanggung jawab dalam Proyek Sodetan Ciliwung

Instansi	Kewenangan	Tanggung Jawab
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta	Pengelolaan berwenang untuk mengelola dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur air, termasuk Sodetan Ciliwung. Perencanaan dan Pengawasan: Mereka berwenang dalam	Pelaksanaan Proyek: Dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek Sodetan Ciliwung, termasuk memastikan bahwa proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

⁵¹ Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dapat diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38201/perpres-no-3-tahun-2016>.

	perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek-proyek yang terkait dengan sumber daya air dan pengendalian banjir.	Koordinasi dengan Masyarakat: Mereka juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan proyek, termasuk penanganan lahan dan relokasi warga jika diperlukan. Pengawasan dan Evaluasi: Setelah proyek selesai, mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas proyek dalam mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
--	---	--

Data Diolah Peneliti, 2025

3.1.1. Penjelasan Mengenai Irisan Pusat dari Kolaborasi

Dalam konsep *Collaborative Governance*, terdapat irisan pusat kolaborasi yang idealnya mencerminkan keseimbangan peran antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil dan pihak swasta. Namun, dalam proyek Sodedan Ciliwung, ditemukan bahwa irisan pusat ini masih belum berjalan secara setara. Pemerintah pusat mendominasi dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan proyek, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proyek-proyek penting, termasuk Sodetan Ciliwung. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih terbatas, terutama dalam aspek pengelolaan sosial seperti pembebasan lahan dan komunikasi dengan masyarakat terdampak. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam proses kolaborasi karena keputusan lebih banyak ditentukan secara *top-down* oleh pemerintah pusat, dengan ruang negosiasi yang terbatas bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Penjelasan ini peneliti narasikan dalam contoh dari lapangan yakni, keputusan mengenai pembebasan lahan di Bidara Cina sebagian besar ditentukan oleh Kementerian PUPR, dengan Pemprov DKI Jakarta hanya berperan sebagai fasilitator tanpa memiliki wewenang penuh dalam negosiasi kompensasi dengan warga terdampak

Selain itu dalam *Collaborative Governance* yang ideal, masyarakat sipil seharusnya memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam proyek Sodetan Ciliwung, keterlibatan masyarakat lebih banyak bersifat pasif dan reaktif, bukan partisipatif. Beberapa permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proyek ini adalah:

1. Kurangnya transparansi informasi mengenai dampak proyek dan skema kompensasi bagi warga terdampak.
2. Minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan resistensi dari warga di beberapa wilayah terdampak proyek.

3. Ketidakjelasan mekanisme partisipasi publik, di mana masyarakat hanya menerima sosialisasi setelah keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat.

Contoh nyata peneliti temukan dalam penolakan warga Bidara Cina terhadap proyek ini pada awalnya terjadi karena minimnya sosialisasi mengenai pembebasan lahan. Masyarakat baru menerima informasi setelah proyek berjalan, sehingga muncul reaksi negatif yang memperlambat implementasi proyek. Pihak swasta (kontraktor) memiliki peran yang cukup signifikan dalam proyek ini, terutama dalam aspek teknis dan konstruksi. Namun, dalam irisan pusat kolaborasi, pihak swasta lebih berorientasi pada aspek proyek dan tidak memiliki peran dalam proses perencanaan sosial serta komunikasi dengan masyarakat.

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan proyek dengan kebutuhan masyarakat lokal, karena kontraktor hanya bekerja sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan daerah tanpa ada mekanisme dialog langsung dengan warga terdampak. Hal ini peneliti temukan dalam PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi sebagai kontraktor utama proyek lebih banyak terlibat dalam aspek teknis, sementara komunikasi sosial dengan masyarakat masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang kewenangannya terbatas. Meskipun proyek Sodedan Ciliwung merupakan implementasi dari Collaborative Governance, kolaborasi yang terjadi masih belum setara karena:

1. Pemerintah pusat mendominasi proses pengambilan keputusan, sementara pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan penuh.

2. Masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan tanpa keterlibatan aktif dalam perencanaan proyek, yang menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap proyek ini.
3. Pihak swasta hanya fokus pada aspek teknis, tanpa keterlibatan dalam dialog sosial dengan warga terdampak.

Agar *Collaborative Governance* dapat berjalan lebih efektif dalam proyek ini, perlu ada peningkatan transparansi, mekanisme dialog yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta distribusi peran yang lebih seimbang antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Dengan begitu melalui indikator pertama ini, mengenai Keterlibatan aktor-aktor, hal ini sejalan dengan kriteria Ansell dan Gash (2007), yaitu forum diinisiasi oleh institusi publik dan melibatkan aktor non-pemerintah. Proyek ini menunjukkan keberagaman dalam partisipasi, namun terdapat tantangan dalam memastikan semua suara terdengar dan diakomodasi.

Tabel 3.4 Matriks Pemangku Kepentingan dalam Kolaborasi Pemerintah di
Proyek Sodedan Ciliwung

		Tugas dan Tanggung Jawab
Pemerintah Pusat	Kementrian PUPR (BBWS Ciliwung-Cisadane)	Menyusun rencana teknis dan melaksanakan pembangunan fisik Sodedan Ciliwung, dan Memberikan Sosialisasi terhadap masyarakat sipil
	Badan Perencanaan	Menetapkan lokasi proyek sodedan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mendukung dalam hal

Pemerintah Daerah	Pembangunan Daerah	koordinasi, pembebasan lahan, dan sosialisasi ke masyarakat
	Dinas Lingkungan Hidup	Menjaga kebersihan dan menyaring serta memilah sampah di Gerbang Inlet Sodekan Ciliwung serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung
	Dinas Sumber Daya Air	Pengelolaan proyek perihai air seperti Sodekan Ciliwung, dan berwenang dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek, serta juga bertanggung jawab untuk membantu pemerintah pusat dengan koordinasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan proyek
Pihak Swasta	PT Wijaya Karya	Fungsi sebagai kontraktor dan menggunakan teknologi <i>Earth Pressure Balance Machine</i> (EPBM) dalam proses pembangunan terowongan ganda sodekan.
	PT Jaya Konstruksi	Fungsi sebagai kontraktor dan menggunakan teknologi <i>Earth Pressure Balance Machine</i> (EPBM) dalam proses pembangunan terowongan ganda sodekan.
Masyarakat Sipil		Mengawasi dan memberikan masukan, saran serta kritik terhadap Pemerintah dari Proyek sejak pembangunan hingga pengoperasian berdasar dampak yang dirasakan secara langsung

Data Diolah Peneliti, 2025

3.2 Komunikasi dan Dialog dalam Pelaksanaan Proyek

Komunikasi yang efektif menjadi indikator kedua. Proyek ini melaksanakan berbagai pertemuan koordinasi dan konsultasi publik untuk menjaga dialog antara semua pihak. Komunikasi dan dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat sangat krusial dalam keberhasilan proyek ini. Hasil wawancara dengan masyarakat di Bidara Cina menunjukkan bahwa sosialisasi proyek masih kurang optimal. Banyak warga mengaku baru mengetahui proyek setelah pengerjaan dimulai, menyebabkan resistensi awal dari beberapa kelompok masyarakat. Dalam pertemuan antara Pemprov DKI dan BBWS Ciliwung-Cisadane pada tahun 2021, dibahas pentingnya peningkatan komunikasi melalui forum diskusi terbuka. Namun, efektivitas komunikasi ini masih perlu ditingkatkan, mengingat beberapa warga yang terdampak masih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas.

Komunikasi dan dialog sangat berperan penting dalam membangun sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Komunikasi antara Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui BBWS Ciliwung-Cisadane dan Pemerintah Daerah melalui Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi pemerintah lainnya, adalah fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan proyek ini.

Berikut adalah keterangan Cipta Aditya dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait komunikasi dan dialog yang ada, sebagai berikut:

Dari komunikasi sendiri, sudah terjalin dengan baik dan lancar antara pemerintah baik pusat serta daerah. Karena kembali ke 3 tahapan fase

sebelumnya, hal tersebut sudah dilakukan bertahap makanya bisa terbilang adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dari instansi pemerintah.⁵²

Komunikasi yang terjalin dengan baik memungkinkan semua pihak untuk memahami dan menyepakati tujuan bersama, yakni mengurangi potensi banjir dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pertama-tama, kolaborasi ini dimulai dari proses dialog yang intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian PUPR, melalui BBWS Ciliwung-Cisadane, memiliki peran sebagai pemimpin dalam hal teknis dan perencanaan besar proyek tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Haryanto Silalahi dari UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait komitmen dalam kolaborasi, sebagai berikut:

Berdasarkan aspek komitmen, setelah proyek selesai pada 2023 sampai wawancara dilakukan pada 2025, komitmen dari setiap stakeholders pada proyek strategis nasional sudah dijalankan dengan baik, terkhususnya pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan menjaga kebersihan Sodedan Ciliwung juga Banjir Kanal Timur, dan diharapkan membuat dampak positif dan signifikan untuk bantaran kali Ciliwung itu sendiri dalam penanganan banjir.⁵³

Namun, tanpa dukungan dan masukan dari Pemerintah Daerah, yang lebih memahami kondisi lokal, kebijakan dan perencanaan yang dihasilkan bisa jadi kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan sangat penting dalam proses perencanaan awal. Penjelasan Hariyanto Silalahi dari UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait *access to resources* yang didalamnya juga tercakup perihal komunikasi dan

⁵² Wawancara dengan Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, Bappeda Provinsi DKI Jakarta,

⁵³ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025

dialog antar instansi terutama dalam akses terhadap Sumber Daya dalam kolaborasi ini, sebagai berikut:

Dalam akses terhadap Sumber Daya sudah terbagi dengan jelas, dan baik, kecuali dari aspek keuangan karena merupakan privasi internal masing masing, namun dalam aspek lain seperti sumber daya, manusia dan lainnya sudah terjalin dengan baik, didukung juga oleh adanya grup komunikasi via WhatsApp yang berisikan anggota Sodedan Ciliwung Kementrian PUPR, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari Pemerintahan kota Bogor yang bertugas di pintu air Katulampa.⁵⁴

Hal ini juga yang saat fase pendengaran dan dialog dilakukan pemanggilan banyak instansi pemerintah daerah dari dinas-dinas yang berhubungan hingga pemerintah kota Bogor. Dalam hal ini, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan kebutuhan lokal. Dialog yang terjalin antara BBWS Ciliwung-Cisadane dan Bappeda memastikan bahwa proyek ini tidak hanya mencakup aspek teknis semata, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di tingkat daerah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proyek ini tidak hanya efisien dalam mencegah banjir, tetapi juga ramah lingkungan dalam artian sempit yakni bebas dari sampah.

Penjelasan dari UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait kolaborasi yang terjadi sudah sesuai sebagaimana Konsep *Good Governance*, sebagai berikut

Di proyek ini *Good Governance* berjalan baik, karena Sungai Ciliwung itu wewenang pemerintah pusat, dan dengan proyek ini adanya pemberian kewenangan melalui Kementrian PUPR terhadap pemerintah daerah, dan setelah proyek selesai penugasan untuk penjagaan kebersihan masih

⁵⁴ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025

diberikan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta, karena pemberian kewenangan sebelumnya yang dilakukan Pemerintah pusat.⁵⁵

Lebih lanjut, instansi pemerintah daerah lainnya juga terlibat dalam komunikasi yang mendalam terkait infrastruktur yang terkait dengan proyek ini. Koordinasi antara berbagai instansi ini menghindari tumpang tindih perencanaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat integratif. Proses komunikasi ini tidak hanya terjadi dalam ruang rapat formal, tetapi juga dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak oleh proyek ini, namun sangat disayangkan pada aspek ini, pemerintah belum bisa memberikan kejelasan informasi berupa penyuluhan ataupun sosialisasi dalam bentuk FGD mengenai Sodedan Ciliwung tersebut, dan hal ini dirasakan salah satunya dari pihak Kelurahan Cawang. Selain itu juga masyarakat dari kelurahan Cipinang Cempedak yang peneliti lakukan wawancara secara tertulis juga mengatakan bahwa memang tidak ada informasi yang jelas perihal sosialisasi dari pemerintah perihal Sodedan Ciliwung,⁵⁶ namun kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Hal ini sejalan kembali dengan data yang peneliti temukan dari narasumber perwakilan masyarakat dari kelurahan Bidara Cina dimana masyarakat tidak mendapati adanya kabar perihal sosialisasi atau apapun sejenis dari tahun awal proyek dilakukan dan hanya menjadi kabar burung diantara

⁵⁵ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025

⁵⁶ Ruviera Alvaro, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Cempedak, 8 Maret 2025.

warga saja.⁵⁷ Masyarakat lokal perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan proyek ini, bagaimana proyek tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka, serta bagaimana mereka dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan proyek tersebut.

Dan hal tersebut belum sepenuhnya berhasil, karena masyarakat hanya baru bisa mengada-ngada untuk dampak yang dirasakan langsung dari proyek besar ini. Selain itu juga dari masyarakat yang peneliti coba wawancara juga berkata disamping kurangnya informasi yang jelas juga langsung mendadak ada penyempitan jalan berupa galian air di jalan Otista III,⁵⁸ yang cukup menghambat pergerakan lalu lintas di sekitarnya, dan pada akhirnya, keberhasilan proyek Sodetan Ciliwung sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengelola komunikasi dan dialog mereka. Hal ini pun masih memerlukan evaluasi kembali kenapa bisa terjadi adanya tidak dilakukan sosialisasi yang menyeluruh terhadap kelurahan tidak dilakukan dengan baik dan benar.

3.2.1. Sosialisasi Terhadap Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung

Pemerintah Pusat telah menyatakan bahwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) melalui berbagai pertemuan dan kegiatan. Namun, informasi spesifik mengenai jadwal dan tema setiap pertemuan sosialisasi tersebut tidak tersedia secara publik. Proyek sodetan ini dimulai pada tahun 2013 dan sempat terhenti

⁵⁷ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

⁵⁸ Ruviera Alvaro, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Cempedak, 8 Maret 2025.

antara 2015 hingga 2021 karena kendala pembebasan lahan. Pembangunan kembali dilanjutkan pada tahun 2021 dan akhirnya selesai serta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Juli 2023. Selama periode tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat terdampak, terutama di wilayah sekitar proyek, seperti Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai progres proyek, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta untuk mendapatkan masukan dari Masyarakat Sipil. Namun disisi lain hal tersebut masih belum sejalan sebagaimana peneliti masih mendapati bahwa dari masyarakat Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang-Cempedak tidak mengetahui sama sekali adanya perihal Sosialisasi dan juga detail yang diberikan baik dari tema beserta kapan pelaksanaannya dari tahun tahun proyek mulai berjalan.⁵⁹⁶⁰

Meskipun proyek Sodetan Ciliwung telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, transparansi informasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan besar. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 telah mengatur pentingnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam penanggulangan banjir, namun dalam implementasinya, keterlibatan masyarakat masih bersifat pasif. Kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga menyebabkan resistensi terhadap proyek ini, terutama dalam hal pembebasan lahan dan kompensasi bagi warga terdampak.⁶¹ Kurangnya mekanisme komunikasi yang

⁵⁹ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

⁶⁰ Ruviera Alvaro, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Cempedak, 8 Maret 2025.

⁶¹ Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2015, dapat diakses di <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/9756>.

efektif antara pemerintah dan warga menyebabkan resistensi terhadap proyek ini, terutama dalam hal pembebasan lahan dan kompensasi bagi warga terdampak. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam mengenai hal ini, karena kembali ke indikator transparansi, dan bahwa memang transparansi yang baik akan berdampak baik dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat sipil terhadap pemerintah serta membuktikan bahwa *Collaborative Governance* terimplementasi dengan benar, dan jika tidak dilakukan secara benar dan terbuka, kedepannya hal tersebut hanya akan menimbulkan reaksi negatif dan resistensi yang besar terhadap pemerintah dari masyarakat akibat ketidakjelasan informasi dari pembangunan besar.

3.3 Keputusan Bersama dalam Implementasi Proyek

Untuk mendukung indikator keputusan bersama perlu dilihat bagaimana keputusan-keputusan yang diambil dalam proyek tersebut melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sejauh mana sinergi tersebut mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan proyek. Dalam konteks proyek Sodetan Ciliwung, yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pemantauan proyek.

Di dalam proyek besar seperti ini, keputusan sering kali melibatkan banyak pihak dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda, mulai dari aspek teknis hingga kebijakan sosial dan lingkungan. Jika dianalisis dari dokumen keputusan

proyek, kita dapat melihat bahwa persentase keputusan yang diambil secara kolaboratif menunjukkan seberapa banyak keputusan tersebut melalui proses diskusi, konsultasi, dan negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan keputusan yang lebih banyak diambil secara sepihak oleh satu pihak saja. Di dalam konteks proyek ini, terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung-Cisadane, Gubernur DKI Jakarta, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi teknis dan lingkungan lainnya yang berada di bawah Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh keputusan besar juga bisa dilihat berdasarkan Keputusan gubernur terhadap penetapan lokasi didirikannya Sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dari Keputusan Nomor 1035 tahun 2020 oleh Anies Baswedan. Keputusan yang diambil tersebut dilakukan secara kolaboratif, yang dimana sudah adanya tindakan melalui fase pendengaran serta fase dialog dan lainnya, salah satu diantara pihak yang terkait yakni gubernur DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane dan instansi pemerintah daerah lain,⁶² hal ini mencerminkan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam prosesnya, yang dimana masing-masing instansi dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan tanggung jawab mereka. Hal lain terjadi di lapangan sesuai narasi diatas, sebagaimana penjelasan Hariyanto Silalahi dari UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait *access to authority*, sebagai berikut

⁶² Wawancara dengan Cipta Aditya, Ketua Subkelompok Pembangunan dan Lingkungan Hidup III, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, Bappeda Provinsi DKI Jakarta,

Sudah jelas semua berjalan sesuai tugasnya masing-masing, dalam proyek ini juga walaupun sudah adanya pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah, namun dari pemerintah pusat (Kementrian PUPR) pun masih mempunyai kantor dan divisi tersendiri yang ditempatkan di Sodedan Ciliwung untuk bisa mengurus dan mengantisipasi proyek tersebut terutama jika terjadi peningkatan debit air, dan hal tersebut akan membuat adanya jalinan komunikasi yang baik kedepannya dari Kementrian PUPR ini dengan Pemerintah daerah melalui UPSBA dan instansi lainnya.⁶³

Kolaborasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek teknis tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, yang sering kali lebih kompleks dan dinamis. Indikator keberhasilan kolaborasi ini dapat dilihat dari bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak mampu menanggulangi potensi konflik kepentingan dan memberikan solusi seperti keputusan Gubernur diatas, dan dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung, penting untuk menghindari keputusan sepihak yang hanya menguntungkan satu pihak dan mengabaikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dengan melibatkan Pemerintah Daerah secara aktif, terutama dalam hal pengawasan dan partisipasi publik, proyek ini dapat memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan yang cepat dan kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Pada akhirnya, hasil analisis dokumen keputusan dapat menunjukkan bahwa banyak keputusan yang diambil melalui forum kolaboratif yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk berinteraksi langsung, menyampaikan pandangan, dan merumuskan kebijakan bersama.

⁶³ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025

Demikian, keputusan dalam proyek Sodetan Ciliwung diambil secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, ada beberapa keputusan yang dianggap lebih didominasi oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah keputusan relokasi warga yang dilakukan pada tahun 2015 tanpa konsultasi yang cukup dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak. Namun, pada 2021, setelah proyek sempat terhenti, Pemprov DKI dan Kementerian PUPR berkoordinasi untuk memastikan keterlibatan lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Dokumen keputusan proyek pada tahap lanjutan tahun 2021 menunjukkan peningkatan kolaborasi dalam proses perencanaan dan eksekusi. Keputusan mengenai proyek Sodetan Ciliwung, seperti penetapan lokasi, diambil secara kolaboratif melalui forum yang melibatkan berbagai instansi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mencapai konsensus, proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kriteria ketiga dari Ansell dan Gash. Dengan demikian berdasar indikator ini penerapan *Collaborative Governance* dilakukan dengan baik dan memperkuat bahwa hal ini berdampak positif dalam implementasinya.

3.4 Transparansi dalam Pelaksanaan Proyek

Untuk mendukung indikator transparansi dalam proyek strategis nasional seperti Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, penting untuk memahami bahwa tingkat transparansi informasi yang dibagikan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan. Transparansi yang baik akan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap proyek, mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu

aspek penting dari transparansi adalah jumlah publikasi dan informasi yang tersedia di situs resmi proyek. Pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung-Cisadane, secara rutin perlu mengunggah pembaruan terkait progres proyek dari pembangunan hingga selesai dan mulai beroperasi, serta analisis dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek tersebut. Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum melalui situs resmi atau kanal informasi lainnya yang mudah diakses, dan hal tersebut belum bisa Peneliti temukan secara jelas, kecuali penjelasan informasi dasar mengenai Sodetan Ciliwung sendiri, seperti yang ditulis pada artikel Kementrian PUPR mengenai peresmian Sodetan Ciliwung dan unggahan Instagram mengenai Sodetan Ciliwung yang diposting pada 4 Agustus 2023 di akun bernama **@pu_sda_ciliwungcisadane**. Selebihnya peneliti tidak menemukan situs resmi lainnya kecuali jika diakses secara langsung di Inlet Sodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Tingkat transparansi proyek Sodetan Ciliwung menjadi salah satu aspek yang banyak mendapatkan sorotan. Berdasarkan laporan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, informasi terkait proyek telah dipublikasikan di situs resmi mereka, namun akses masyarakat terhadap informasi ini masih terbatas. Rincian anggaran dari APBN juga menjadi bagian dari transparansi yang harus diperhatikan. Berikut adalah anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini:

1. 2013: Rp 200 miliar untuk tahap perencanaan.
2. 2015: Rp 492 miliar untuk penyelesaian tahap pertama (550 meter).

3. 2021: Rp 600 miliar untuk melanjutkan proyek setelah terhenti.⁶⁴

4. 2023: Total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun untuk penyelesaian proyek.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Agis dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, terutama dalam hal alokasi dana untuk kompensasi lahan warga yang terdampak. Namun didapati memang keterbukaan terhadap fasilitas taman bermain dan sebagainya yang sudah dibangun pemerintah daerah untuk warga belum ada kejelasan kapan fasilitas itu bisa dinikmati warga hingga detik ini, hal tersebut juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap keterbukaan informasi di warga sekitar mengenai perkembangan proyek Sodetan Ciliwung dalam kurun waktu mingguan bahkan bulanan. Selain itu, *feedback* dari masyarakat terkait akses informasi ini juga menjadi elemen penting dalam menciptakan transparansi. Pemberian ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau pertanyaan terkait dengan proyek, baik melalui forum diskusi online, survei, atau langsung ke instansi yang terlibat, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan serta implementasi proyek tersebut. Dan berdasarkan wawancara dengan masyarakat dari kelurahan Cipinang-Cempedak dimana memang tidak mengetahui adanya informasi perihal

⁶⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur,” Kementerian PUPR, diakses 23 Maret 2025, <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lanjutkan-pembangunan-sodetan-sungai-ciliwung-ke-kanal-banjir-timur>.

⁶⁵ CNBC Indonesia, “Sodetan Ciliwung Mangkrak Era Ahok-Anies, Diberesin Jokowi,” CNBC Indonesia, 31 Juli 2023, diakses 23 Maret 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230731103705-4-458650/sodetan-ciliwung-mangkrak-era-ahok-anies-diberesin-jokowi>.

situs resmi ataupun memang platform untuk memberikan masukan, kritik, atau pertanyaan terkait dengan proyek.⁶⁶

Hal tersebut didukung kembali data lainnya dari masyarakat kelurahan sebelah yakni Bidara Cina dimana juga tidak ada info sama sekali perihal sosialisasi ini tentang apa dan kapan dilaksanakannya dari pemerintah pusat ataupun daerah sehingga sosialisasi menjadi kabar burung diantara warga.⁶⁷ Dan berkaca dari hal tersebut seharusnya melalui mekanisme yang benar, masyarakat pun bisa mengawasi jalannya proyek serta memastikan bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah hasil dari proses yang terbuka dan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan transparansi tidak hanya menyangkut akses informasi, tetapi juga integritas dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut dalam lapangan bisa terlihat dari penjelasan Hariyanto Silalahi dari UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait *information sharing*, sebagai berikut

Kemudahan akses informasi terhadap pelaksanaan Sodedan Ciliwung sangat terbuka, warga juga bisa mengetahui apabila dalam proyek tersebut terutama pada musim hujan dan tinggi muka air mulai naik pesat, akses untuk Sodedan Ciliwung bisa terbuka dari Dinas Sumber Daya Air yang berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup juga Kementerian PUPR sehingga bersiap mengatasi dan mengantisipasi menjalankan Sodedan Ciliwung ini.⁶⁸

Informasi yang terbuka mengenai setiap tahapan proyek harus dipertanggung-jawabkan oleh pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah

⁶⁶ Ruviera Alvaro, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Cempedak, 8 Maret 2025.

⁶⁷ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

⁶⁸ Hariyanto Silalahi, Ketua Satuan Pelaksana UPSBA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, wawancara dengan Peneliti, 13 Februari 2025

daerah, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek ini akan lebih membuahkan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat secara transparan, baik dalam bentuk kemajuan fisik proyek maupun manfaat jangka panjang yang akan dirasakan oleh masyarakat. Tingkat transparansi dalam proyek ini sering kali dipertanyakan oleh masyarakat. Meskipun ada pengumuman resmi, banyak warga yang merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai dan dalam indikator ini transparansi bisa dikatakan belum baik karena masih ada kurangnya informasi dan transparansi terhadap masyarakat sipil, hal tersebut menunjukkan bahwa aspek transparansi ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dan dengan itu, masih perlu ada pembenahan dalam transparansi terhadap masyarakat.

3.5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Proyek Sodetan Ciliwung

Evaluasi proyek dilakukan melalui pertemuan berkala antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI. Namun, berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti mekanisme pemantauan dampak lingkungan setelah proyek selesai. Dalam konteks evaluasi dan tindak lanjut pada proyek strategis nasional, seperti Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, mekanisme evaluasi memainkan peranan yang sangat penting dalam menilai efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, dan Pemerintah Daerah, yang terwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya. Mekanisme evaluasi yang diterapkan dalam proyek

ini tidak hanya untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah banjir di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam kolaborasi tersebut, serta untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan proyek di masa mendatang. Hal tersebut meliputi Dokumentasi hasil evaluasi yang mencakup: Capaian Fisik dan Keuangan, lalu Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak lalu juga Penilaian terhadap Hasil yang Dicapai, selain itu ada juga tindak lanjut dari Pertemuan Evaluasi dimana Tindak lanjut yang dihasilkan dari pertemuan evaluasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antar lembaga. Dalam konteks proyek Sodetan Ciliwung, tindak lanjut ini biasanya mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh setiap pihak yang terlibat. Peneliti pada penelitian ini belum menemukan adanya evaluasi lebih lanjut dari setiap instansi yang diwawancara, akan tetapi untuk aspek Dokumentasi Hasil Evaluasi pada cakupan Koordinasi dan Komunikasi antar pihak masih sering dilakukan oleh BBWS Ciliwung Cisadane dengan Dinas Lingkungan Hidup di Inlet Sodetan Ciliwung, Kelurahan Bidara Cina. Mekanisme evaluasi yang diterapkan dalam proyek ini mencakup penilaian terhadap pencapaian fisik dan keuangan. Namun, hasil evaluasi tidak selalu dibagikan kepada semua pemangku kepentingan, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek tindak lanjut.

Dimana setiap harinya terjadi kolaborasi yang melakukan *maintenance* terhadap keadaan mesin Sodetan Ciliwung itu sendiri berdasarkan kapabilitas

wewenang masing-masing instansi. Dimana BBWS Ciliwung-Cisadane berfokus terhadap mesin dan Dinas Lingkungan Hidup melalui departemen UPSBA berfokus terhadap pengendalian dan penanganan sampah yang ada dari DAS Ciliwung dan sekitar gerbang masuk pipa Inlet Sodetan Ciliwung agar tidak tersaring masuk ke *Arriving Shaft* menuju outlet Sodetan Ciliwung di Banjir Kanal Timur, Cipinang. Dengan demikian, mekanisme evaluasi yang tepat dan tindak lanjut yang berkesinambungan sangat berperan dalam memastikan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam proyek Sodetan Ciliwung dapat berjalan efektif, memberikan hasil yang optimal, dan menjawab permasalahan yang ada secara tuntas. Dan dalam indikator ini peneliti yakin sudah memperkuat argumentasi bahwa kolaborasi sudah berjalan dan terimplementasi dengan benar.

Kolaborasi antar institusi bisa terlihat dari penggunaan 5 indikator yang sudah dijabarkan, sebagaimana penjelasan yang ada, telah menunjukkan bahwa kolaborasi terbangun dengan baik. Namun kolaborasi tersebut sebatas melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, sementara kepanjangannya di tingkat kelurahan hingga masyarakat yang terdampak langsung tidak disertakan.

Perwakilan Kelurahan Cawang, Kusaidi dan Edwin Rinaldo, Sekretaris dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cawang, yang notabene lebih dekat secara langsung terhadap warga, beranggapan tidak dilibatkan dalam proyek tersebut

Sosialisasi yang merupakan bagian dari ranah dari Pemerintah Pusat dibantu Pemerintah Daerah, belum dilakukan baik dalam segi tata Kelola, ataupun adanya ajakan dalam pengadaan (FGD) *Forum Group Discussion* perihal Sodetan Ciliwung, seperti pembahasan perihal cara kerja sistem dari Sodetan itu sendiri yang memiliki ketentuan tersendiri kapan sekiranya gerbang bisa dibuka untuk memindahkan aliran Sungai Kali Ciliwung yang tinggi menuju

Sungai Cipinang dan Banjir Kanal Timur yang berjarak 1,2 km, oleh karena itu terlihat bahwa pembangunan tetap dilakukan tanpa komunikasi yang cukup baik dengan kelurahan Cawang, pihak terkait hanya mengetahui info dasar yang memang dijelaskan dari adanya Pembangunan Sodetan tersebut tanpa ada aksesibilitas yang jelas.⁶⁹

Keterangan dari perwakilan pemerintah kelurahan di atas menunjukkan bahwa pihak kelurahan dan warga sekitar kelurahan Cawang belum merasakan adanya bagian dalam kolaborasi pemerintah, yang cukup baik melalui penyebaran informasi dan transparansi dari Stakeholder lainnya saat pendirian pembangunan Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung hingga sekarang saat program sudah rampung dan berjalan selama kurang lebih setahun lebih beberapa bulan terakhir.⁷⁰

Hal ini dapat dijelaskan dalam proyek kolaborasi ini juga semua berjalan sesuai SOP dan kewenangan masing-masing yang dimana saat perihal sengketa lahan terjadi dan sudah dapat diselesaikan oleh pemerintahan daerah, baru disitulah terjadi pembangunan yang bekerja sama dengan kontraktor dari KSO antara PT WIKA dan PT Jaya Konstruksi untuk pembangunan Sodetan Ciliwung baik dari Inlet di daerah kelurahan Bidara Cina hingga menuju outlet di Kali Cipinang dan Banjir Kanal Timur. Pendapat lain juga diutarakan dalam penanganan banjir di Jakarta dalam gambaran besar akibat selalu adanya perubahan baik dalam pengaturan anggaran dan perubahan pimpinan.⁷¹

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Kusaidi, Sekretaris Kelurahan Cawang, pada tanggal 21 Februari 2025.

⁷⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Kusaidi, Sekretaris Kelurahan Cawang, pada tanggal 21 Februari 2025.

⁷¹ Wawancara langsung dengan Bapak Kusaidi, Sekretaris Kelurahan Cawang, pada tanggal 21 Februari 2025.

Tama dan Fadli, Operator Sodetan Ciliwung yang bekerja langsung dibawah Kementrian PUPR melalui BBWS Ciliwung-Cisadane memberi informasi mendalam bahwa dari segi pandangan operator juga selama mengoperasikan mesin juga mengalami kolaborasi yang terjadi dan terjalin dengan baik, dimana selama setahun terakhir dari pertengahan 2023 saat Sodetan Ciliwung diresmikan, hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup selalu menjalin kerja sama dalam pemeliharaan, dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bergerak pada ranah kebersihan, dalam arti, apabila Sodetan Ciliwung beroperasi saat Daerah Aliran Sungai Ciliwung mendekati 10 mdpl, pada frekuensi itu gerbang Inlet Sodetan Ciliwung akan dibuka dan air Sungai akan disedot dan dipindahkan Sebagian menuju outlet Sodetan Ciliwung. Dalam operasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup akan membantu memilah sampah dalam segala ukuran agar tidak memasuki dalam bagian *Arriving Shaft* atau bagian tengah pipa dari 2 gerbang penyambung pada Inlet menuju Outlet. Dalam pengalaman para operator bekerja kolaborasi yang terjadi dikatakan selalu berjalan dengan baik, dalam arti baik dari komunikasi, informasi bahkan transparansi juga akses terhadap SDA yang tersedia itu jelas diantara pihak yang berkepentingan.

Para operator juga berkata bahwa warga sekitar Sodetan Ciliwung sebenarnya juga sudah bisa mendapati informasi dari kejadian yang ada pada program Sodetan Ciliwung tersebut, namun memang akses masuk langsung ke sekitar bangunan Sodetan Ciliwung yang mempunyai beberapa fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah masih tertutup dan belum diketahui kapan akan dibuka.⁷²

⁷² Tama dan Fadli, Operator Sodetan Ciliwung dari Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung Cisadane, wawancara langsung, 26 Februari 2025.

Namun dari ranah pendirian Sodetan yang bekerja sama dengan pihak Swasta dari PT WIKA serta PT Jaya Konstruksi dan juga dalam segi pemeliharaan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, pada aspek tersebut Pemerintah Pusat selaku penggerak utama Proyek Strategis Nasional ini sudah dilakukan dengan baik dan profesional sebagaimana seharusnya.⁷³

Proyek Strategis Nasional (PSN) Sodetan Ciliwung merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta. Namun, dalam pelaksanaannya proyek ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Respons ini bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan proyek, dampak langsung yang dirasakan, serta komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam mensosialisasikan proyek ini. Sebagian masyarakat yang terdampak secara langsung menunjukkan sikap skeptis terhadap proyek Sodetan Ciliwung, terutama mereka yang mengalami relokasi akibat proyek ini. Hal tersebut juga sejalan dimana peneliti mendapatkan data dari masyarakat Kelurahan Bidara Cina yang mengemukakan bahwa dalam kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah selama proses-nya itu berjalan lambat, “Proses ganti ruginya mungkin ya yang agak lebih lambat dari seharusnya.”⁷⁴

Kekhawatiran utama yang muncul adalah mengenai kompensasi bagi warga yang harus dipindahkan, ketidakpastian terkait tempat tinggal baru, serta potensi hilangnya sumber mata pencaharian. Selain itu sebagian masyarakat juga belum

⁷³ Tama dan Fadli, Operator Sodetan Ciliwung dari Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung Cisadane, wawancara langsung, 26 Februari 2025.

⁷⁴ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

menganggap bahwa proyek ini belum memberikan solusi jangka panjang jika tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan air secara menyeluruh. Selain itu juga peneliti mendapat data bahwa masyarakat dari Kelurahan Bidara Cina berpesan agar memang pemerintah berbenah dan berevaluasi, sebagai berikut:

Masih terlihat kurangnya kordinasi antara pusat dan daerah, dan ingin berpesan agar kedepannya pemerintah lebih mempertimbangkan dan memperhatikan mengenai penggantian yg sesuai bagi orang yang terkena proyek tersebut.⁷⁵

Dari *statement* diatas, memang pemerintah masih perlu banyak evaluasi berdasarkan respon masyarakat yang variatif, terutama yang merasakan dampak langsung dari pembebasan lahan dari proyek yang didirikan. Di sisi lain, juga masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap proyek Sodetan Ciliwung karena proyek tersebut dianggap sebagai langkah konkret dalam mengatasi permasalahan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak dulu. Selain itu, masyarakat dari Kelurahan Cipinang-Cempedak berharap adanya pergerukan sungai-sungai sekitar kedepannya untuk mendukung integrasi dari proyek Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung serta bendungan lainnya dalam penanganan banjir secara menyeluruh di Jakarta.⁷⁶ Mereka menilai proyek ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta. Masyarakat sipil yang sering mengalami banjir menyatakan harapan besar bahwa sodetan ini dapat mengurangi genangan air, terutama di kawasan rawan banjir.

⁷⁵ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

⁷⁶ Ruviera Alvaro, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswa yang bertempat tinggal di Kelurahan Cipinang Cempedak, 8 Maret 2025.

Dalam rangka memastikan efektivitas jangka panjang dari Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, beberapa langkah strategis telah dirancang:

1. Integrasi dengan proyek pengendalian banjir lainnya: Pemerintah menargetkan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung, serta peningkatan kapasitas Bendungan Ciawi dan Sukamahi.
2. Optimalisasi manajemen air: Penggunaan teknologi pemantauan debit air secara *real-time* dan sistem peringatan dini perlu dikembangkan lebih lanjut agar Sodetan Ciliwung dapat berfungsi secara maksimal dalam mengantisipasi banjir.

Dan pada 2025, Gubernur DKI Jakarta merencanakan evaluasi lanjutan terhadap efektivitas Sodetan Ciliwung, terutama dalam kaitannya dengan upaya pengerukan ulang untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian banjir. Proyek Sodetan Ciliwung berfungsi mengalirkan debit banjir dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang sebesar 60 m³/detik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko banjir di beberapa kawasan hilir Sungai Ciliwung, seperti Kampung Melayu dan Manggarai.⁷⁷

3.5.1. Dampak Implementasi Sodetan Ciliwung

Dengan selesainya Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung pada 2023, dampaknya bisa mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam pengurangan risiko banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Beberapa dampak utama yang telah teridentifikasi adalah:

⁷⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, "Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur," diakses 8 Februari 2025, <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-lanjutkan-pembangunan-sodetan-sungai-ciliwung-ke-kanal-banjir-timur>.

1. Penurunan Frekuensi dan Durasi Genangan

Sebelum Sodetan Ciliwung beroperasi, daerah sekitar Sungai Ciliwung sering mengalami banjir dengan ketinggian yang bervariasi, terutama saat musim hujan. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil akibat kerusakan properti dan infrastruktur. Dengan adanya Sodetan Ciliwung, frekuensi banjir yang terjadi berkurang karena air yang mengalir ke daerah hilir dapat langsung dialihkan. Selain itu, durasi genangan yang sebelumnya bertahan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari kini mengalami penurunan signifikan. Data 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa genangan yang terjadi lebih cepat surut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Sodetan Ciliwung berperan dalam mempercepat aliran air keluar dari daerah terdampak dan mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat.⁷⁸⁷⁹⁸⁰

2. Dampak Positif terhadap Infrastruktur dan Ekonomi Lokal

Salah satu dampak paling nyata dari berkurangnya banjir adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Sebelumnya, beberapa ruas jalan utama di sekitar Sungai Ciliwung sering mengalami genangan yang menghambat mobilitas warga dan kendaraan. Dengan berkurangnya banjir, jalan-jalan ini kini lebih aman dan

⁷⁸ Antara News. (2025, 7 Maret). Masih banjir, warga Jaktim pertanyakan fungsi Sodetan Ciliwung. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4687541/masih-banjir-warga-jaktim-pertanyakan-fungsi-sodetan-ciliwung>

⁷⁹ Kompas.id. (2024, 25 Maret). Kali Ciliwung meluap, sebagian wilayah Jakarta banjir hingga setinggi 2 meter. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/25/kali-ciliwung-meluap-sebagian-wilayah-jakarta-banjir-hingga-setinggi-2-meter>

⁸⁰ DPRD DKI Jakarta. (2024, 19 September). Perjalanan banjir kanal hingga Sodetan Ciliwung. DPRD DKI Jakarta. <https://dprd-dkijakartaprof.go.id/perjalanan-banjir-kanal-hingga-sodetan-ciliwung>

lebih mudah dilalui, sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan tidak mudah terganggu oleh genangan air. Selain itu, pemukiman yang sebelumnya sering terdampak banjir juga mengalami perbaikan. Dengan kondisi lingkungan yang lebih baik dan minim risiko banjir, masyarakat lebih nyaman dalam beraktivitas. Hal ini juga berpengaruh pada sektor ekonomi lokal, karena pedagang dan usaha kecil yang biasanya terganggu oleh banjir kini dapat beroperasi lebih stabil tanpa takut mengalami kerugian akibat air masuk ke tempat usaha mereka.

Selain itu hal tersebut juga sejalan dengan statement dari narasumber yang Peneliti dapat dengan Agis, Bidang Perencanaan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta:

Pendirian Sodetan Ciliwung membawa berbagai dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal pengurangan banjir. Warga yang sebelumnya sering terdampak banjir, seperti di Kampung Melayu dan Bidara Cina, kini mengalami penurunan frekuensi serta tinggi genangan air, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih lancar. Selain itu, proyek ini membantu meningkatkan kesehatan lingkungan, karena berkurangnya genangan air yang dapat menjadi sumber penyakit seperti demam berdarah dan infeksi saluran pernapasan. Secara ekonomi, proyek ini juga berdampak pada peningkatan stabilitas usaha dan mata pencaharian masyarakat. Dengan kondisi lingkungan yang lebih aman dari banjir, para pedagang kecil, pekerja, dan sektor informal lainnya tidak lagi mengalami gangguan akibat terputusnya akses transportasi atau kerusakan barang dagangan. Kemacetan akibat banjir yang kerap terjadi juga semakin berkurang, sehingga efisiensi mobilitas meningkat.⁸¹

Secara keseluruhan, implementasi proyek Sodetan Ciliwung memberikan dampak positif yang signifikan dan juga seperti di dampak yang dijelaskan pada poin penurunan frekuensi dan durasi genangan juga sejalan dengan *statement* dari Fadli, operator Sodetan Ciliwung, dimana selama mengoperasikan Sodetan

⁸¹ Agis, Bidang Perencanaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, wawancara tertulis dengan Peneliti, 11 Maret 2025

Ciliwung sejak awal beroperasi, banyak dampak positif yang terjadi terutama dalam penurunan frekuensi sungai yang tinggi dan durasi banjir yang terjadi.⁸² Hal tersebut juga didukung data yang peneliti dapat dari masyarakat Kelurahan Bidara Cina dimana memang dampak positif dirasakan akibat adanya Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung yakni “banjirnya jadi lebih cepat surut”.⁸³ Meskipun masih ada hambatan dan tantangan selama pendirian proyek ini dan setelah rampung hampir tidak ditemukan permasalahan, tetap perlu dilakukan pemeliharaan mesin Sodetan Ciliwung secara berskala, dan juga meng-optimalisasi fungsi Sodetan Ciliwung ke depan, karena keberhasilan dalam mengurangi risiko banjir yang dihasilkan Sodetan Ciliwung ini menjadi langkah maju dalam penanggulangan banjir di kota Jakarta kedepannya.

3.5.2. Tantangan dan Hambatan dalam Pendirian Proyek Sodetan Ciliwung

Tantangan dan hambatan yang ada di lapangan menurut Bappeda DKI Jakarta, meliputi:

- 1 Gugatan *Class Action* 321/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST (Kelurahan Bidara Cina) BBWS Ciliwung-Cisadane mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat pada tanggal 6 september 2017. Pengajuan banding oleh BBWS Ciliwung Cisadane dikarenakan:
 - a. Ketidakjelasan atas alas hak warga yang berada pada trase sudetan di Kelurahan Bidaracina dimana pada lokasi tersebut terdapat Sertifikat Hak Pakai No.227/Bidaracina milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

⁸² Fadli, Operator Sodetan Ciliwung dari Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung Cisadane, wawancara langsung, 26 Februari 2025

⁸³ Adinda Shafa, wawancara tertulis oleh Farrell Surya, mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Bidara Cina, 9 Maret 2025.

berdasarkan amar putusan PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak sah dan mengikat;

- b. Ketidakjelasan atas alas hak warga yang berada pada trase sudetan di Kelurahan Gugatan Class Action 321/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST (Kelurahan Bidaracina) Bidaracina dimana pada lokasi tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik No.26/Bidaracina milik Saudara. Henky Saputra dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesampingkan kepemilikan lahan yang sah atas nama Saudara Henky Saputra dengan ditolaknya gugatan penggugat intervensi; Dengan tidak jelasnya alas hak warga yang berada di lokasi rencana sudetan di Kelurahan Bidaracina tersebut, maka putusan PN Jakarta Pusat tersebut dapat berpotensi menyebabkan masalah hukum lainnya apabila diikuti dimana pada lahan milik Pemerintah Provinsi DKI (SHP No.227/Bidaracina) merupakan tanah negara yang tidak memerlukan ganti rugi, serta pada lahan SHM No.26/Bidaracina terdapat pemilik sah tanah yang berhak atas ganti kerugian.

2 Permasalahan di Lokasi Outlet LEONKUTLET

- a. Belum disepakatinya peta bidang untuk pengadaan tanah untuk Outlet Sudetan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dimana terdapat lahan milik Yayasan STMT Trisakti dan Saudara Suminta yang masih belum jelas statusnya;
- b. Lahan milik Yayasan STMT Trisakti berdasarkan SIPPT No.3050/-1.711.5 tanggal 30 Oktober 2003 tercatat seluas ± 16.589 m², namun berdasarkan HGB No. 495 tanggal 11 Juni 2003 hanya seluas 12.089 m²;

- c. Selisih luas 4.500 m² milik Yayasan STMT Trisakti tersebut diklaim milik Saudara Suminta bin Nurhasan berdasarkan girik C 342 persil 218 SI yang mana telah terkena proyek Kanal Banjir Timur seluas ± 1.000 m² tanpa ganti rugi, dan sisa luas tanah 3.500 m² saat ini secara fisik dikuasai oleh Suminta bin Nurhasan. Ketidakjelasan kepemilikan lahan tersebut menjadikan proses pengadaan tanah terhenti.

3 Langkah Lanjutan:

- a. Diperlukan pengukuran lahan yang berada di dalam trase sudetan. Dibutuhkan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat diberikan izin pengukuran terhadap semua bidang tanah yang berada di dalam trase sudetan kali Ciliwung menuju kanal banjir timur;
- b. Dilakukan penilaian nilai tanah dan bangunan oleh *timap praisal independent* setelah diperoleh data pengukuran

Selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air menjabarkan tantangan yang dialami, sebagai berikut:

Sungai Ciliwung merupakan kewenangan Kementerian pusat, sodetan Kali Ciliwung juga dibangun oleh BBWSCC, namun terkait dengan SOP Sodetan Kali Ciliwung menyangkut pengaturan debit banjir yang masuk ke wilayah Jakarta (Pintu Air Manggarai). Sehingga tantangan saat ini yaitu kami membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan SOP debit banjir, karena DKI Jakarta tidak bisa menentukan SOP Sodetan Kali Ciliwung sendiri.⁸⁴

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dijabarkan beberapa hal mengenai tantangan dan hambatan yang ada di lapangan, untuk tantangan skala besar bagi UPSBA sendiri tidak mengalami secara langsung tantangan dalam

⁸⁴ Agis, Bidang Perencanaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, wawancara tertulis dengan Peneliti, 11 Maret 2025

proyek ini, namun selama melaksanakan tugas ditemukan adanya kehambatan, dimana saat arus kali Ciliwung yang deras akibat curah hujan tinggi, dan air tersebut datang terbawa dari hulu (Bogor) itu sangat deras juga membawa sampah yang banyak, hal tersebut tidak bisa diatasi langsung oleh petugas UPSBA yang akan membersihkan sampah-sampah ini di Sodetan Ciliwung, alhasil diharuskan menunggu debit air itu tersebut turun dahulu baru bisa diturunkan ke lapangan untuk membersihkan sampah yang ada. Jika melihat dari tantangan yang dirasakan pemerintah pusat, berdasarkan wawancara dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijabarkan beberapa hal mengenai tantangan dan hambatan yang ada di lapangan, yakni apa yang menjadi tantangan utama sekaligus hambatan yakni pada tahap pengadaan lahan dimana Lokasi Pembangunan membutuhkan pembebasan lahan yang dimiliki oleh Masyarakat.

Permasalahan lahan menjadi hambatan dan tantangan utama pada pendirian Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, walaupun secara hukum hal tersebut sudah berjalan sesuai prosedur hukum yang benar, namun penggantian rugi dan kompensasi masih dilakukan secara tidak benar dan tidak sesuai waktu dan SOP yang ada, dan hal ini masih didukung dari data masyarakat kelurahan Bidara Cina dimana Pemerintah memproses perihal kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat terdampak dari sengketa lahan secara lambat dan telat dari tenggat waktu yang ada. Hal tersebut perlu menjadi evaluasi dan teguran secara langsung terhadap pemerintah baik pusat sebagai aktor utama beserta pemerintah daerah yang menjadi jembatan diantara Pusat dan masyarakat, dimana keadilan tetap perlu

diberlakukan karena kedepannya proyek serupa akan tetap dilaksanakan, sebagaimana berdasarkan banjir besar yang terjadi di JABODETABEK terutama Bekasi, membuat Gubernur Pramono Anung berencana untuk mempertimbangkan mengeruk kembali Sodetan Ciliwung dan juga menargetkan pembebasan lahan kembali dalam waktu dekat yang dilakukan di Pengadegan, Ciliwung, dan Bidara Cina. Sebab, wilayah tersebut mengalami dampak banjir paling parah saat intensitas curah hujan tinggi di Jabodetabek, yang akan berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dengan bertujuan mengurangi dampak banjir.⁸⁵

Secara keseluruhan, meskipun proyek Sodetan Ciliwung telah berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak, masih diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi, transparansi, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas proyek dalam jangka panjang. Berdasarkan analisis terhadap Bab 3 dalam dokumen skripsi yang telah direstrukturisasi menggunakan lima indikator operasionalisasi konsep (Keterlibatan Stakeholder, Komunikasi dan Dialog, Keputusan Bersama, Transparansi, dan Evaluasi dan Tindak Lanjut), berikut adalah pencocokan dengan enam kriteria Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2007):

1. **Forum Diinisiasi oleh Institusi Publik:** Sudah sesuai dengan sub bab **Keterlibatan Stakeholder** karena proyek Sodetan Ciliwung diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

⁸⁵ Kompas.id. (2025, 7 Maret). Tak mampu cegah banjir, Sodetan Ciliwung perlu dikeruk ulang. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/tak-mampu-cegah-banjir-sodetan-ciliwung-perlu-dikeruk-ulang>

2. **Partisipan Termasuk Aktor Non-Pemerintah:** Masuk dalam **Keterlibatan Stakeholder** dan **Komunikasi dan Dialog**, karena proyek ini juga melibatkan masyarakat terdampak dan organisasi masyarakat sipil.
3. **Partisipan Terlibat Langsung dalam Pengambilan Keputusan:** Sesuai dengan **Keputusan Bersama**, karena proses pengambilan keputusan proyek ini mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, meskipun ada indikasi keputusan dominan tetap pada pemerintah.
4. **Forum Terorganisasi Secara Formal dengan Pertemuan Rutin:** Terkait dengan **Komunikasi dan Dialog**, yang mencakup mekanisme komunikasi formal antar aktor melalui berbagai forum dan pertemuan.
5. **Kebijakan Berdasarkan Konsensus:** Terkait dengan **Keputusan Bersama**, namun perlu dievaluasi apakah keputusan benar-benar berbasis konsensus atau lebih bersifat *top-down*.
6. **Kolaborasi Berfokus pada Kebijakan Publik atau Manajemen Publik:** Selaras dengan **Evaluasi dan Tindak Lanjut**, karena proyek ini bertujuan untuk mitigasi banjir sebagai kebijakan publik.

Secara keseluruhan, kelima sub bab utama telah mencakup enam kriteria *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2007), tetapi mungkin perlu penguatan pada aspek keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar lebih mencerminkan prinsip *Collaborative Governance* secara ideal. Dan dari seluruh aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini, peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi ini tidak berjalan dan tidak setara, karena didominasi oleh Pemerintah Pusat selaku inisiator utama proyek ini.